

BAB V

PEMBAHASAN

Pada bab pembahasan, penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan program kelas unggulan dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTsN 2 Kota Kediri. Dalam praktiknya, program kelas unggulan menjadi strategi madrasah dalam memberikan layanan pembelajaran bagi siswa yang berpotensi tinggi, sekaligus dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah. Pembahasan pada bab ini difokuskan pada analisis hasil penelitian dengan mengaitkannya pada landasan teori yang digunakan. Melalui pembahasan tersebut, diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan program kelas unggulan sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan di lingkungan madrasah.

A. Perumusan Masalah Kebijakan Program Kelas Unggulan di MTsN 2 Kota Kediri

Berdasarkan pemaparan pada temuan penelitian, perumusan masalah kebijakan program kelas unggulan di MTsN 2 Kota Kediri dilatarbelakangi oleh adanya sebuah perbedaan kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Penjelasan dari kepala madrasah, ketua program kelas unggulan, waka kurikulum, dan guru kelas unggulan mengemukakan bahwa perbedaan kemampuan tersebut menimbulkan kebutuhan akan layanan pendidikan yang lebih spesifik bagi siswa dengan potensi tinggi agar dapat berkembang secara optimal.

Hal tersebut sejalan dengan teori analisis kebijakan menurut H.A.R. Tilaar dan Rian Nugroho, yang menyatakan bahwa tahap dalam perumusan

masalah merupakan langkah awal dalam mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di lapangan secara mendalam.¹³⁴ Dalam konteks ini, madrasah mampu mengidentifikasi bahwa peserta didik dengan kemampuan unggul membutuhkan pendekatan pembelajaran yang berbeda dibandingkan dengan kelas reguler. Secara konseptual, program kelas unggulan menjadi solusi atas permasalahan tersebut dengan cara mengelompokkan siswa berdasarkan potensi akademiknya. Program tersebut juga diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan. Sejalan dengan itu, menurut Dzaujak Ahmad, mutu pendidikan dapat dipahami sebagai kemampuan lembaga pendidikan dalam mengelola seluruh komponen pendidikan secara efektif dan efisien sehingga menghasilkan peningkatan kualitas dan nilai tambah yang sesuai dengan norma serta standar yang berlaku.¹³⁵

Prosedur perumusan masalah bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan secara mendalam serta mengaitkannya dengan pengetahuan yang relevan terhadap kebijakan yang dikaji, yang kemudian akan digunakan untuk menyusun agenda. Tahap ini membantu dalam mengungkap asumsi-asumsi yang tersembunyi, menganalisis penyebab masalah, dan menentukan tujuan yang mungkin dicapai.¹³⁶ Madrasah mampu mengidentifikasi adanya perbedaan kemampuan siswa sehingga madrasah membuat model layanan khusus bagi peserta didik yang memiliki

¹³⁴ Abd. Majid, *Analisis Kebijakan Pendidikan*. (Yogyakarta: Samudra Biru (Anggota IKAPI), 2018). hlm 10.

¹³⁵ Draujak Ahmad, *Penunjuk Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar*. (Jakarta: Depdikbud, 1996). hlm 8.

¹³⁶ Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003).

potensi akademik tinggi. Dari hasil analisis tersebut, madrasah menyusun berbagai dasar pertimbangan yang mengacu pada visi, misi, serta regulasi Kementerian Agama untuk memastikan bahwa program kelas unggulan sejalan dengan arah pengembangan institusi. Perencanaan dilanjutkan dengan penyusunan kurikulum tambahan yang mencakup kegiatan riset, proyek, pembiasaan keagamaan, serta bina prestasi sebagai bentuk pengayaan kurikulum reguler.

Pola di atas selaras dengan teori analisis kebijakan pendidikan yang telah tercantum dalam landasan teori skripsi peneliti yaitu berdasarkan William Dunn, menjelaskan bahwa perumusan masalah terdiri dari pencarian masalah (*problem search*), pendefinisian masalah, spesifikasi masalah, dan pengenalan masalah.¹³⁷ Pada tahap ini, sebuah masalah diangkat ke dalam agenda kebijakan berdasarkan kriteria tertentu, seperti besarnya dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat dan urgensi penanganan masalah tersebut.

Dalam penelitian ini, sesuai dengan pernyataan kepala madrasah bahwa tahap *problem search* dilakukan dengan mengidentifikasi kondisi nyata di madrasah dan kebutuhan peserta didik unggulan. Tahap pendefinisian masalah terlihat dari penetapan perbedaan kemampuan akademik sebagai fokus masalah kebijakan. Tahap spesifikasi masalah diwujudkan melalui penyusunan desain program kelas unggulan beserta kurikulum dan mekanisme pelaksanaannya. Sedangkan tahap pengenalan masalah tampak dari adanya kesadaran madrasah terhadap tuntutan

¹³⁷ William Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003).

peningkatan mutu pendidikan, harapan masyarakat, serta pentingnya mempertahankan citra lembaga pendidikan unggulan. Hal ini juga dikaitkan dengan teori mutu pendidikan yang memandang kualitas sebagai kondisi yang mencakup produk, layanan, proses, lingkungan, dan sumber daya manusia untuk meningkatkan hasil guna memenuhi kebutuhan pengguna atau pelanggan pendidikan.¹³⁸

Menurut pandangan peneliti dapat disimpulkan bahwa, perumusan masalah kebijakan program kelas unggulan di MTsN 2 Kota Kediri dilakukan secara sistematis dengan berangkat dari identifikasi adanya perbedaan kemampuan akademik peserta didik. Madrasah melihat bahwa siswa berpotensi tinggi membutuhkan pendekatan pendidikan yang lebih terarah. Proses perumusan kebijakan ini dilakukan melalui tahapan analisis masalah, yakni mulai dari pencarian, pendefinisian, spesifikasi, hingga pengenalan masalah, dengan mempertimbangkan visi dan misi madrasah. Dengan demikian, program kelas unggulan dirumuskan sebagai solusi strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan, memberikan layanan yang sesuai dengan potensi siswa, serta memperkuat kualitas dan citra madrasah.

B. Proyeksi Kebijakan Program Kelas Unggulan di MTsN 2 Kota Kediri

Proyeksi kebijakan merupakan kelanjutan dari proses pembuatan kebijakan yang akan terjadi yakni di masa mendatang. Seperti yang sudah dijelaskan oleh kepala madrasah dan dikuatkan oleh ketua program kelas unggulan bahwa madrasah merancang berbagai strategi untuk memastikan keberhasilan program kelas unggulan di masa depan. Berdasarkan hasil

¹³⁸ F. Tjiptono and A. Diana, *Total Quality Management (TOM) Edisi Revisi*. (Yogyakarta: Andi Offset, 2003). hlm 3.

penelitian, proyeksi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan potensi peningkatan prestasi siswa, kebutuhan sumber daya, serta kemungkinan tantangan dalam pelaksanaan program. Hal ini juga sesuai dengan teori proyeksi dalam kebijakan pendidikan yakni oleh William Dunn, yakni proyeksi digunakan untuk memperkirakan masa depan yang realistis, memiliki potensi, dan bernilai secara normatif, serta untuk menilai dampak dari kebijakan yang sedang berlaku maupun yang diusulkan. Selain itu, proyeksi juga membantu mengidentifikasi berbagai kemungkinan kendala yang dapat menghambat pencapaian tujuan.¹³⁹

Sejalan dengan teori serta korelasinya terhadap temuan penelitian, hasil penelitian menunjukkan yakni tujuan untuk memprediksi dampak dari kebijakan yang akan diterapkan. MTsN 2 Kota Kediri memproyeksikan bahwa program kelas unggulan dapat meningkatkan prestasi akademik siswa, memperkuat citra madrasah, serta meningkatkan minat masyarakat terhadap lembaga tersebut. Selain itu, madrasah juga mempertimbangkan berbagai hambatan, seperti keterbatasan sarana prasarana, kesiapan tenaga pendidik, dan beban belajar siswa. Dengan adanya proyeksi yang matang, program kelas unggulan dapat dirancang secara lebih sistematis dan berkelanjutan.

Pola di atas selaras dengan teori proyeksi kebijakan pendidikan yang telah tercantum dalam landasan teori skripsi peneliti oleh Nanang Fattah yakni, proyeksi memberikan berbagai sebuah alternatif yang realistis untuk dicapai yakni di masa depan. Secara sederhana, proyeksi yaitu bertujuan

¹³⁹ William Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003). hlm 26-27.

memperkirakan kondisi masa depan yang realistis dan bernilai, serta menilai dampak dari kebijakan yang sedang berjalan maupun yang diusulkan. Selain itu, proyeksi juga digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan hambatan dalam pencapaian tujuan serta menilai kelayakan politik suatu kebijakan.¹⁴⁰

Berdasarkan analisis peneliti, proyeksi kebijakan program kelas unggulan di MTsN 2 Kota Kediri dilakukan sebagai langkah strategis untuk memprediksi keberlanjutan, efektivitas, serta dampak program terhadap peningkatan mutu pendidikan di masa mendatang. Madrasah tidak hanya memproyeksikan peningkatan prestasi akademik siswa dan citra lembaga, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan sumber daya, kesiapan tenaga pendidik, serta potensi hambatan yang dapat memengaruhi pelaksanaan program. Dengan mengacu pada teori peramalan/proyeksi kebijakan William Dunn, proses *forecasting* ini menunjukkan bahwa kebijakan dirancang secara antisipatif melalui analisis peluang, tantangan, dan alternatif pengembangan program, sehingga implementasi kelas unggulan dapat berjalan lebih terarah, realistis, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan pendidikan di masa depan.

C. Rekomendasi Kebijakan Program Kelas Unggulan di MTsN 2 Kota Kediri

Rekomendasi kebijakan dalam program kelas unggulan di MTsN 2 Kota Kediri merupakan tahap yang cukup penting. Tahap ini dilakukan melalui proses musyawarah dan koordinasi antar pihak yang terlibat, seperti

¹⁴⁰ Nanang Fattah, *Analisis Kebijakan Pendidikan*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013). hlm 8.

kepala madrasah, wakil kepala bidang kurikulum, tenaga pendidik. Dapat dilihat bahwa yang ditemukan berdasarkan temuan penelitian, rekomendasi kebijakan ini mencakup penyusunan kurikulum yang lebih adaptif, peningkatan kualitas guru, serta penyediaan fasilitas pendukung pembelajaran.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat William Dunn yang menyatakan bahwa rekomendasi kebijakan berfungsi untuk memberikan alternatif solusi terbaik dalam pencapaian tujuan kebijakan. Dunn juga menjelaskan bahwa rekomendasi menghasilkan informasi yang relevan mengenai manfaat dan biaya dari berbagai pilihan kebijakan, yang dampaknya di masa depan telah diperkirakan melalui proses proyeksi. Informasi ini membantu para pengambil kebijakan yakni dalam tahap adopsi kebijakan serta dalam mempertimbangkan ketidakpastian pada proses implementasinya.¹⁴¹

Selaras dengan teori William Dunn, bahwa tahap rekomendasi kebijakan dalam meningkatkan mutu pendidikan dapat memberikan informasi terkait nilai atau manfaat dari berbagai pilihan solusi terhadap suatu permasalahan yakni di masa yang akan datang.¹⁴² Dengan adanya rekomendasi yang tepat, program kelas unggulan tidak hanya berfokus pada peningkatan prestasi para siswa, tetapi juga pada pengembangan sistem pendidikan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

Berdasarkan analisis peneliti, rekomendasi kebijakan program kelas unggulan di MTsN 2 Kota Kediri disusun sebagai langkah strategis untuk

¹⁴¹ William Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003). hlm 27.

¹⁴² Nanang Fattah, *Analisis Kebijakan Pendidikan*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013). hlm 55.

memastikan program berjalan secara efektif, adaptif, dan berkelanjutan. Proses rekomendasi dilakukan melalui musyawarah antar pihak madrasah dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, kualitas pembelajaran, serta kesiapan sumber daya yang dimiliki. Rekomendasi tersebut mencakup penguatan kurikulum, peningkatan kompetensi guru, dan penyediaan fasilitas pendukung agar program mampu mencapai tujuan peningkatan mutu pendidikan. Sesuai dengan teori William Dunn dan Nanang Fattah, rekomendasi kebijakan tidak hanya berfungsi sebagai alternatif solusi, tetapi juga sebagai dasar dalam mempertimbangkan manfaat, risiko, dan keberlangsungan program ini, sehingga kebijakan kelas unggulan dapat diterapkan secara lebih terarah dan memberikan dampak positif bagi pengembangan pendidikan di madrasah.

D. Implementasi Kebijakan Program Kelas Unggulan di MTsN 2 Kota Kediri

Implementasi kebijakan program kelas unggulan di MTsN 2 Kota Kediri merupakan keberhasilan nyata dari pembentukan kebijakan program. Implementasi ini menunjukkan bahwa program ini telah berjalan secara sistematis dan terstruktur. Pelaksanaan program meliputi proses seleksi siswa, penyusunan kurikulum khusus, serta pelaksanaan pembelajaran dan tambahan layanan program yang berbeda dibandingkan kelas reguler. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini didukung oleh faktor sumber daya manusia yang kompeten, sistem organisasi yang baik, serta komitmen dari seluruh pihak yang terlibat.

Sesuai dengan teori implementasi kebijakan yang menekankan pentingnya faktor pelaksana, sistem organisasi, dan kejelasan kebijakan. Menurut Hasbullah, implementasi kebijakan adalah proses menggambarkan aktivitas politis dalam bentuk serangkaian langkah yang terstruktur sesuai urutan waktu.¹⁴³ Dunn, juga menjelaskan bahwa implementasi merupakan salah satu fase dalam proses pembuatan kebijakan di mana kebijakan yang telah disetujui dijalankan oleh unit administratif dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan finansial.¹⁴⁴ Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses penerapan kebijakan yang telah dirumuskan ke dalam tindakan nyata sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif.

Dalam implementasi program kelas unggulan ini, peneliti juga menemukan bahwa penggunaan sumber daya dilakukan secara efisien melalui perencanaan anggaran, serta dukungan orang tua dan mitra kerja menjadi faktor penting dalam keberlanjutan program. Hal ini sejalan dengan teori yang menyebutkan bahwa sumber pembiayaan pendidikan berasal dari tiga pihak, yaitu orang tua peserta didik, pemerintah pusat, serta pihak lain yang turut memberikan dukungan dana.¹⁴⁵ Implementasi dari program kelas unggulan juga tentunya memiliki kegiatan tambahan yang mendukung pengembangan prestasi, karakter, dan spiritualitas siswa. Hal ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa keberhasilan pembentukan karakter

¹⁴³ Elih Yuliah, "Implementasi Kebijakan Pendidikan (The Implementation of Educational Policies)," *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, Vol.3, No.2, 2020. hlm 130.

¹⁴⁴ Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003).

¹⁴⁵ Siska Yulia Weny, dkk., "Manajemen Pembiayaan dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan," *JoIEM*, Vol.5, No.1, April 2024. hlm 13.

peserta didik ditentukan oleh penerapan budaya sekolah atau madrasah yang konsisten, karena melalui kebiasaan tersebut karakter yang diharapkan dapat terbentuk dengan baik.¹⁴⁶

Program kelas unggulan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan mutu pendidikan, baik melalui capaian akademik peserta didik maupun peningkatan citra lembaga madrasah. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan ini dapat dinilai cukup efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Lebih jauh, tahap implementasi menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan suatu kebijakan, karena pada tahap ini dapat terlihat sejauh mana kebijakan yang dirumuskan dapat dijalankan secara optimal serta memberikan dampak nyata. Dalam praktiknya, program kelas unggulan di MTsN 2 Kota Kediri menunjukkan hasil yang positif, baik dari aspek prestasi siswa maupun penguatan reputasi madrasah sebagai institusi pendidikan yang unggul.

Dari sudut pandang peneliti, implementasi kebijakan program kelas unggulan di MTsN 2 Kota Kediri menunjukkan bahwa kebijakan telah dilaksanakan secara sistematis melalui seleksi siswa, pengembangan kurikulum, serta layanan program tambahan yang mendukung kebutuhan peserta didik unggulan. Keberhasilan implementasi didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, sistem organisasi yang terstruktur, serta dukungan pendanaan baik dari orang tua, pemerintah, dan mitra kerja. Program ini tidak hanya berjalan sesuai tujuan kebijakan, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan prestasi akademik siswa

¹⁴⁶ Moh. Zainal Fanani, "Penanaman Nilai Karakter Melalui Pengembangan Budaya Sekolah," *Al-Hikmah*, Vol.3, No.2, September 2013. hlm 298.

dan reputasi madrasah, sehingga implementasi kebijakan dapat dinilai efektif dalam meningkatkan mutu pendidikan dan dapat berjalan serta berkembang untuk masa mendatang.

E. Evaluasi Kebijakan Program Kelas Unggulan di MTsN 2 Kota Kediri

Evaluasi kebijakan program merupakan tahapan yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan program kelas unggulan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian, evaluasi dilakukan secara berkala melalui pemantauan prestasi siswa, efektivitas pembelajaran, serta kepuasan *stakeholder*. Secara teoritis, evaluasi kebijakan mencakup aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Sejalan dengan pendapat Nanang Fattah, kriteria yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja kebijakan pada tahap ini mencakup efektivitas, yakni tingkat ketercapaian tujuan yang diharapkan dari kebijakan tersebut. Selain itu, juga terdapat aspek efisiensi yang menilai besarnya sumber daya dan usaha yang diperlukan untuk menghasilkan capaian kebijakan. Kecukupan, yaitu menilai sejauh mana kebijakan dapat memenuhi kebutuhan yang ada. Responsivitas, yaitu tingkat kemampuan kebijakan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketepatan, yaitu sejauh mana tujuan kebijakan sesuai dengan nilai atau asumsi yang mendasarinya.¹⁴⁷

William Dunn, juga menjelaskan bahwa evaluasi ini membantu pengambilan kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan.¹⁴⁸ Hasil evaluasi menunjukkan bahwa program kelas unggulan mampu memberikan

¹⁴⁷ Nanang Fattah, *Analisis Kebijakan Pendidikan*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013). hlm 234-235.

¹⁴⁸ William Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003). hlm 28-29.

kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan di madrasah. Hal tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya prestasi siswa, kepercayaan masyarakat, serta daya saing lembaga pendidikan. Dalam konteks ini, program kelas unggulan di lembaga MTsN 2 Kota Kediri dinilai efektif dalam meningkatkan prestasi siswa dan mutu pendidikan, walaupun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Kepala madrasah mengungkapkan dalam evaluasi yang dilakukan tersebut merupakan upaya madrasah dalam meningkatkan kualitas program supaya lebih baik ke depannya.

Sejalan dengan pemikiran Nanang Fattah, bahwa evaluasi kebijakan program bertujuan memang untuk mengukur tingkat kesesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dan hasil yang sebenarnya. Tahap ini memberikan informasi penting dalam proses pengambilan keputusan, terutama pada evaluasi kebijakan dan proses pembuatannya.¹⁴⁹ Tahapan evaluasi yang dipakai dalam program kelas unggulan di MTsN 2 Kota Kediri dilakukan terstruktur dan berkelanjutan, mengacu pada tahapan evaluasi kebijakan pendidikan. Berdasarkan temuan penelitian dan dikaitkan dengan teori evaluasi kebijakan, tahapan tersebut yaitu evaluasi diawali dengan pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan meliputi hasil belajar siswa, proses pembelajaran, kinerja guru, serta dukungan sarana prasarana. Tahap ini bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata tentang pelaksanaan program kelas unggulan di lapangan.

¹⁴⁹ Nanang Fattah, *Analisis Kebijakan Pendidikan*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013). hlm 9.

Selanjutnya, pengukuran kinerja program, pada tahap ini madrasah menilai sejauh mana program kelas unggulan telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Indikator yang digunakan meliputi peningkatan prestasi akademik, efektivitas pembelajaran, serta ketercapaian target kurikulum. Pengukuran ini menjadi dasar dalam menentukan keberhasilan program. Evaluasi dilakukan dengan mengacu pada kriteria kebijakan pendidikan, seperti, efektivitas yang sejauh mana program mencapai tujuan, efisiensi atau kesesuaian antara hasil dan penggunaan sumber daya, kecukupan dan kemampuan program dalam memenuhi kebutuhan siswa, serta responsivitas yakni kesesuaian program dengan kebutuhan *stakeholder* dan ketepatan relevansi program dengan tujuan pendidikan. Hasil evaluasi digunakan oleh pihak madrasah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program.

Peneliti menyimpulkan bahwa hasil evaluasi program menunjukkan implementasi kebijakan kelas unggulan di MTsN 2 Kota Kediri berjalan cukup efektif dalam meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini terlihat dari berbagai indikator, seperti peningkatan prestasi akademik siswa, proses pembelajaran yang semakin terarah, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap madrasah. Secara keseluruhan, tahap evaluasi ini menegaskan bahwa program kelas unggulan tidak hanya dilaksanakan, tetapi juga terus dievaluasi dan disempurnakan agar dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap peningkatan mutu pendidikan di MTsN 2 Kota Kediri.